

# Kekerasan di Sekolah: Paradoks bagi Upaya Membangun Generasi Muda Berkarakter Adil dan Setara

Oleh: Tuti Budirahayu<sup>1</sup>

## Abstrak

Berbagai bentuk kekerasan di sekolah semakin banyak diberitakan di berbagai media massa. Kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada murid sesungguhnya potensial menyebabkan permusuhan, pengucilan, pengabaian, penindasan dan ketidakadilan. Bila anak didik terbiasa menerima berbagai bentuk kekerasan, maka perilaku yang ditampilkan dalam relasi sosialnya antara lain adalah rasa rendah diri, putus asa, menarik diri dari pergaulan, atau bahkan sebaliknya menjadi pemberontak dan pembuat masalah di sekitarnya.

Tulisan ini bermaksud menunjukkan bahwa kekerasan dan ketidakadilan yang dialami anak-anak di sekolah seringkali terjadi dalam proses belajar-mengajar di kelas maupun di lingkungan sekolah. Data atau informasi yang digunakan dalam tulisan ini diambil dari hasil penelitian tentang kekerasan yang dialami siswa-siswa di Sekolah Dasar dengan karakteristik yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan proses pendidikan di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Layanan pendidikan yang diterima siswa di sekolah unggulan dan nonunggulan cenderung berbeda, di mana perbedaan tersebut berkonsekuensi pada kesenjangan fasilitas pendidikan yang dapat dinikmati murid. (2) Iklim akademik yang berbeda di sekolah unggulan dan nonunggulan, membawa konsekuensi pada perbedaan bentuk-bentuk penghargaan dan hukuman yang dialami siswa di masing-masing sekolah, di mana penghargaan lebih sedikit diberikan kepada murid-murid di sekolah nonunggulan dibandingkan dengan hukumannya. Terbukti, cukup banyak siswa yang seringkali mendapatkan hukuman fisik dan verbal (yang terkategori sebagai bentuk kekerasan pada anak) untuk berbagai bentuk pelanggaran yang mereka lakukan. Sedikitnya penghargaan guru terhadap siswa, dan sebaliknya seringnya siswa mendapat hukuman atau kekerasan fisik, menunjukkan adanya tindakan atau perlakuan yang diskriminatif dari para guru terhadap murid-muridnya. Artinya, guru-guru di sekolah nonunggulan cenderung tidak menghargai eksistensi dan hak-hak murid.

Kata kunci: kekerasan, hukuman, sekolah dasar, murid, iklim akademik

## Pendahuluan

Memasuki dekade tahun 2000, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan berbagai bentuk kekerasan di sekolah semakin banyak diberitakan di berbagai media massa. Bentuk-bentuk kekerasan itu melibatkan guru ketika menghukum muridnya, atau siswa senior yang ingin 'mendisiplinkan' juniornya, atau antarmurid saling melecehkan hingga terjadi baku hantam karena persoalan-persoalan yang nampaknya mungkin sepele. Kekerasan yang terjadi di sekolah—baik yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, maupun antar murid sendiri—berlangsung karena relasi atau interaksi yang tidak setara di antara pihak yang melakukan kekerasan dengan pihak yang mengalami kekerasan, di mana pihak yang melakukan kekerasan itu mungkin memiliki fisik yang lebih kuat atau secara sosial memiliki wewenang atau struktur hirarki lebih tinggi dibandingkan dengan pihak yang mengalami kekerasan.

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah, oleh sebagian pihak sering juga disebut dengan *bullying*, yaitu suatu situasi di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, di mana pihak yang memiliki kekuatan atau kekuasaan itu, melukai korbannya, baik secara fisik, verbal maupun psikis dan sang korban tidak mampu membela diri atau melakukan perlawanan untuk mempertahankan diri karena merasa lemah (SEJIWA, 2008, hal. 2). Berbagai bentuk kekerasan yang dilaporkan dan dicatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2007, tercatat bahwa sebanyak 555 kasus kekerasan telah menimpa anak Indonesia di mana 18 persen pelakunya adalah orang terdekat, dan di antara orang-orang terdekat yang melakukan

---

<sup>1</sup> Staf pengajar di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Airlangga

kekerasan pada anak, sebanyak 11,8 persen adalah guru dari anak-anak itu sendiri (VIVAnews, 24 Oktober 2008). Laporan KPAI Pada tahun 2009 juga menunjukkan bahwa kekerasan pada anak yang terjadi di sekolah menduduki peringkat ke dua setelah kekerasan yang terjadi di rumah, yaitu sekitar 25 persen dari semua kasus kekerasan yang dilaporkan ke KPAI dalam kurun waktu 2008 dan 2009 (Gagah Wijoseno, 2010).

Kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada murid atau murid senior kepada murid junior sesungguhnya potensial menyebabkan permusuhan, pengucilan, pengabaian, penindasan dan ketidakadilan. Bila anak didik terbiasa menerima berbagai bentuk kekerasan tanpa penjelasan atau alasan yang masuk akal, maka perilaku yang ditampilkan dalam relasi sosialnya antara lain adalah rasa rendah diri, putus asa, menarik diri dari pergaulan, atau bahkan sebaliknya menjadi pemberontak dan pembuat masalah di sekitarnya. Bila generasi muda cenderung mendapat perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang seperti itu maka sangat besar peluang bagi mereka untuk menjadi bagian dari subkultur 'menyimpang' seperti kelompok terorisme, gang anak-anak nakal, masuk dalam jaringan perdagangan narkoba, atau kelompok-kelompok kriminal lainnya yang seringkali meresahkan masyarakat.

Tulisan ini bermaksud menunjukkan bahwa kekerasan dan ketidakadilan yang dialami anak-anak di sekolah seringkali terjadi dalam proses belajar-mengajar di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kekerasan juga cenderung dialami pada siswa-siswa di sekolah 'pinggiran' di mana mereka seringkali mengalami perlakuan tak layak, tidak mendapatkan penghargaan atau penghormatan yang baik dari lingkungannya. Data atau informasi yang digunakan dalam tulisan ini diambil sebagian dari hasil penelitian tentang kekerasan yang dialami siswa-siswa Sekolah Dasar dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan yang mereka alami (Budirahayu, 2013).

### 1. Realitas Kekerasan di Sekolah

Kekerasan adalah sebuah ekspresi, baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Kekerasan terjadi karena umumnya berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian, semua kewenangan yang disertai dengan tindakan kesewenang-wenangan dapat dimasukkan dalam rumusan kekerasan. Jadi kekerasan di sekolah dapat terjadi pada murid yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan gurunya, atau pada murid yang lebih junior oleh murid seniornya.

Munculnya kekerasan di sekolah bisa dianalisis melalui beberapa pola kekerasan. Lies Marcoes (2002) menjelaskan, bahwa ada tiga pola kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pertama, terjadi ketika ada ketimpangan relasi; kedua, terjadi karena adanya *stereotype* tentang korban; dan ketiga, karena keberanian dan pembangkangan yang dilakukan oleh korban.

Pola pertama menunjukkan bahwa kekerasan bisa dialami siapa saja dalam hubungan yang asimetris. Di sekolah, kekerasan bisa terjadi di antara guru dengan murid, atau di antara kakak kelas dan adik kelas di mana relasi itu sedemikian timpangnya sehingga guru atau kakak kelas bisa berbuat semena-mena kepada murid atau adik kelasnya. Pola kedua, kekerasan berangkat dari anggapan adanya kelompok minoritas yang memiliki *stereotype* berbeda sehingga dianggap pantas mendapat perlakuan sewenang-wenang dari kelompok mayoritas. Seperti orang-orang kulit putih yang merasa punya legitimasi melakukan tindakan kekerasan terhadap warga kulit

hitam. Tanpa adanya legitimasi yang dijadikan dasar pembenaran dari tindakan itu, kekerasan sulit untuk terjadi. Begitu pula guru terhadap murid, biasanya murid-murid yang sering mengalami kekerasan di sekolah memiliki karakteristik atau *stereotype* tertentu, seperti: dianggap nakal, tidak sopan, sering membuat onar di kelas, atau berasal dari ras, etnis, atau status sosial minoritas jika dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Pola ketiga, dalam konteks kekerasan pada murid sekolah, stereotip yang dihidupkan pasti seputar tingkah laku murid yang dinilai 'sok tahu', sombong, tak sopan, melawan, tak mau diatur oleh guru atau kakak kelas. Dengan alasan itulah, guru atau kakak kelas merasa punya legitimasi "mengajari" adik kelasnya. Dengan cara ini, kelak diharapkan si murid bisa tunduk. Jika tidak tunduk, maka segala bentuk kekerasan akan diberikan kepada murid yang dianggap berani melawan.

Eko Indarwanto (2004) menyebutkan bahwa penyebab kekerasan terhadap murid bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan itu sendiri dan akibat negatifnya. Masih cukup banyak guru yang beranggapan, bahwa dengan memberikan hukuman kepada murid, maka murid akan jera dan tidak mengulang lagi kesalahan yang diperbuatnya. Namun, dari sisi murid, dampak kekerasan akan sangat berbeda, bahkan murid bisa sangat membenci atau semakin tidak hormat kepada gurunya. Kekerasan dalam pendidikan terjadi karena guru memperlakukan murid sebagai subyek, di mana guru memiliki otoritas untuk membentuk kepribadian dan bahkan *habitus* murid, apa lagi ketika murid yang dihadapi sang guru memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal nilai-nilai sosial dan kultural, norma, kebiasaan-kebiasaan, atau perilaku yang berbeda dengan apa yang dipahami guru atau murid-murid yang berasal dari kelompok masyarakat dominan atau mayoritas.

Susilowati (2008) dari hasil kajiannya menunjukkan bahwa kombinasi antara faktor aktor (dalam hal ini adalah guru) dan sistem pendidikan, bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap siswa. Kurangnya pengetahuan guru tentang tidak efektifnya kekerasan dalam memotivasi siswa atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa. Kekerasan juga berkaitan dengan kondisi psikologis siswa dalam mengelola emosi hingga guru menjadi lebih sensitif dan reaktif.

Dampak kekerasan yang dialami murid diantaranya murid merasa takut, kehilangan kemerdekaannya (*fear from freedom*), martabat mereka direndahkan, dan bahkan pertumbuhan dan perkembangan diri mereka terhambat. Donald Greydanus E, dkk (2003) mencatat bahwa kekerasan dalam pendidikan merupakan *promotion of the wrong message*. Promosi pesan yang keliru itu berdampak pada: (a) sikap guru yang cenderung memakai kekerasan, mengikuti teladan para tokoh otoritas atau pengganti orangtua mereka yang memakai kekerasan juga; (b) sikap orangtua dan pendidik menerapkan kekerasan sebagaimana dulu mereka alami. Bagi mereka kekerasan itu sah-sah saja namun menjadi suatu bentuk promosi yang salah karena menganggap bahwa kekerasan adalah tindakan wajar dan bisa diterima. Masyarakat pun menganggap kekerasan sebagai sarana untuk mendisiplinkan orang-orang muda agar mereka bersedia tunduk pada aturan-aturan yang ada.

Kekerasan yang dialami siswa di sekolah, baik fisik, psikis atau verbal, pada umumnya terjadi karena *habitus* yang dikembangkan oleh guru-guru di sekolah. *Habitus* atau kebiasaan dan bahkan budaya kekerasan itu dianggap wajar oleh para guru sebagai bagian dari upaya mendidikan atau menundukkan perilaku siswa yang dianggap "tidak dapat diatur". Kekerasan yang dialami siswa di sekolah bisa terjadi baik di sekolah unggulan maupun di di sekolah-sekolah pinggiran. Kekerasan yang dialami siswa di sekolah pinggiran eskalasinya menjadi

semakin meningkat karena keterbatasan fasilitas dan sarana belajar yang minim di sekolah. Artinya, seringkali murid-murid dari sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas belajar atau sarana-prasarana yang memadai mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari para guru mereka karena berbagai keterbatasan. Sebagai contoh, ketika sekolah tidak mampu menyediakan fasilitas belajar yang baik, seperti ruang kelas dan bangku yang layak, buku-buku pelajaran yang mencukupi, atau alat peraga pendidikan yang memadai, seringkali guru atau kepala sekolah membiarkan keadaan itu dan terus menyelenggarakan proses belajar dalam keadaan yang serba kekurangan. Ini sama artinya dengan menimpakan ketidaknyamanan dan ketidakadilan itu kepada para siswa, dan perlakuan semacam itu dapat pula dikategorikan sebagai bentuk kekerasan pada siswa.

## **2. Kesenjangan Kualitas Pendidikan dan Habitus Kekerasan di Sekolah**

Kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah dapat menjadi salah satu faktor yang menguatkan terjadinya kekerasan di sekolah. Kesenjangan kualitas pendidikan itu dapat dilihat dari perbedaan ciri-ciri fisik bangunan atau sarana-prasarana sekolah, dan juga kegiatan belajar yang sehari-hari berlangsung di sekolah. Sekolah yang menyandang label nonunggulan, pinggiran atau marjinal, umumnya memiliki sarana-prasarana pendidikan yang memprihatinkan, seperti kondisi bangunan sekolah yang tidak terawat, alat-alat penunjang belajar yang sudah usang atau tidak sesuai jamannya, dan kegiatan belajar diselenggarakan dengan standar minimal. Sebaliknya, di sekolah unggulan, kondisi bangunan sekolah dan sarana pendidikan dapat dikatakan sangat memadai. Kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah sesungguhnya bertentangan dengan prinsip kesetaraan atau egaliter (Bowles, Samuel & Herbert Gintis, 1976). Dengan fungsi egaliternya itu sekolah seharusnya dapat berperan memenuhi rasa keadilan sosial bagi semua siswanya.

Kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah selain menimbulkan rasa ketidakadilan sosial, juga dapat menjadi pemicu menguatnya kekerasan fisik, verbal maupun simbolik kepada para siswa di sekolah. Dikatakan demikian karena di sekolah pinggiran atau marjinal, guru-guru cenderung menimpakan kekesalan terhadap murid karena kondisi sarana dan fasilitas di sekolah yang serba terbatas. Dalam keadaan yang serba terbatas guru harus mampu menguasai kelas, murid pun sulit berkonsentrasi belajar karena keterbatasan sarana belajar. Ketika murid tidak mampu memenuhi harapan guru, maka tak segan guru akan memarahi muridnya (kekerasan verbal), dan bahkan guru memukul muridnya (kekerasan fisik) karena kejengkelannya pada murid yang tidak patuh. Akibat dari kekerasan fisik maupun verbal membuat murid trauma seperti: menjadi rendah diri, pasif atau apatis, enggan belajar, merasa ketakutan, sulit berkonsentrasi, nampak murung dan lebih senang menyendiri.

Jenis kekerasan lainnya yang juga dialami murid adalah kekerasan simbolis. Istilah ini dipopulerkan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu bersama rekannya, Passeron, membangun 'teori kekerasan simbolik' dalam penelitian empiris mereka tentang sistem pendidikan di Perancis (Jenkins, Richard, 2004). Kekerasan simbolik, menurut Bourdieu, adalah pemaksaan sistem simbolisme dan makna (misalnya kebudayaan atau nilai-nilai budaya) dari suatu kelompok atau kelas tertentu kepada kelompok atau kelas lainnya sedemikian rupa sehingga hal itu dianggap sebagai sesuatu yang sah atau *legitimate*. Pemaksaan itu dianggap berhasil ketika legitimasi sistem simbolisme itu dapat meneguhkan relasi kekuasaan. Kekerasan simbolik berlangsung ketika terjadi proses 'salah mengenali' (*misrecognition*), yaitu suatu proses di mana relasi kekuasaan tidak dipersepsikan secara obyektif, namun dalam bentuk yang menjadikan mereka sah di mata pengikutnya.

Konsep kekerasan simbolik ini dapat dipahami di ranah relasi kekuasaan di antara berbagai posisi sosial yang bersifat mendominasi. Dalam bentuknya yang sangat halus, kekerasan simbolis yang dilakukan oleh para agen sosial, seperti guru, dapat diterima dengan baik oleh para muridnya tanpa mengundang resistensi atau perlawanan dari para murid. Contoh bekerjanya kekerasan simbolis di sekolah, terjadi manakala guru sebagai agen sosial dari kelompok masyarakat dominan, melakukan berbagai tindakan atau praktik pedagogi, termasuk juga mengindoktrinasi dan memaksa murid-muridnya untuk mengikuti les pelajaran tambahan, atau menambah materi pelajaran di luar jam belajar formal di kelas. Tidak semua murid berhasil menginternalisasi nilai-nilai tersebut, tetapi semua murid 'terpaksa' untuk mengikuti jalan pikiran guru-guru mereka. 'Paksaan' guru terhadap murid-muridnya itu kadangkala dilandasi oleh keinginan para guru mempertahankan nilai-nilai masyarakat kelompok dominan, seperti nilai-nilai "berprestasi", "keunggulan", "kecerdasan" atau "keberbakatan", di mana nilai-nilai itu diyakini sebagai sesuatu yang baik dan patut untuk diperjuangkan. Nilai-nilai semacam itu sesungguhnya tidak bersifat universal tetapi milik kelompok-kelompok atau kelas dominan dan diteguhkan atau dilegitimasi terus menerus oleh struktur kelas dominan. Nilai-nilai semacam itu disalahkenali (*misrecognition*) oleh kelompok yang didominasi sebagai nilai-nilai yang berlaku universal dan dapat dicapai oleh semua orang. Ketika guru-guru di sekolah mengajarkan kepada para siswanya bahwa nilai-nilai tersebut sebagai sesuatu yang baik dan patut dimiliki oleh siswa, maka kekerasan simbolik telah bekerja.

Hampir di setiap sekolah dapat ditemukan adanya kekerasan simbolik. Beberapa hal yang secara implisit mencerminkan fenomena kekerasan simbolik di sekolah dapat dilihat dari: (a) proses seleksi siswa karena siswa akan tersaring berdasarkan status sosial-ekonomi orang tuanya dan tingkat intelegensi dan kemampuan yang dimilikinya; (b) biaya pendidikan yang relatif membebani orang tua murid; (c) diterapkannya metode pembelajaran eksklusif di beberapa sekolah dengan memisahkan atau mengelompokkan siswa menurut kemampuannya (*ability grouping*), seperti diselenggarakannya program kelas unggulan atau akselerasi (Budirahayu, Tuti, 2012).

Menganggap wajar berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada murid di sekolah sesungguhnya merupakan habitus yang seharusnya sudah harus ditinggalkan. Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan individu untuk menghadapi kehidupan sosial. Setiap individu dibekali dengan serangkaian skema atau pola yang diinternalisasikan, yang digunakannya untuk merasakan, memahami, menyadari dan menilai setiap tindakan dan merespon tindakan orang lain. Secara dialektis habitus adalah "produk internalisasi struktur" dunia sosial, atau "struktur sosial yang diinternalisasikan kepada individu." Dalam pengertian yang lebih umum, habitus menunjuk pada gaya hidup, nilai-nilai, perilaku, kecenderungan atau aturan (*disposisi*), dan harapan-harapan dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Habitus dikembangkan melalui pengalaman dan sosialisasi, seperti ketika individu belajar tentang apa yang diharapkan dari kehidupan, bagaimana orang lain merespon mereka jika mereka melakukan suatu tindakan, misalnya harus bertindak sopan dengan cara-cara yang khusus, memberi hukuman kepada individu/murid yang melakukan pelanggaran atau tidak menerapkan disiplin dan sopan-santun, dan seterusnya. Habitus dari masing-masing kelompok berbeda, karena masing-masing kelompok memiliki pengalaman dan kesempatan yang berbeda pula dalam kehidupan mereka.

Kekerasan terhadap anak atau murid di sekolah, baik itu yang bersifat fisik, verbal, bahkan simbolik, sesungguhnya melawan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam UU itu disebutkan bahwa disiplin sekolah seharusnya dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat anak. Lebih lanjut pada pasal 37 dinyatakan bahwa tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Begitu pula di dalam Pasal 54 disebutkan bahwa sekolah wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan yg dilakukan oleh guru, siswa, maupun penyelenggara pendidikan. Bagi yang melanggar, bisa dikenai pasal 80 dengan ancaman hukuman 3,6 tahun penjara dan atau denda uang Rp 7,2 juta untuk kekerasan ringan dan 5 tahun penjara dan atau denda 100 juta untuk kekerasan berat. Melalui Undang-Undang dan konvensi tentang hak-hak anak itu, maka seharusnya seorang murid memiliki rasa aman dan bahagia menempuh proses pendidikannya sehingga semangat belajar dan kesenangan untuk mencari ilmu selalu tumbuh di dalam dirinya. Kekerasan yang dialami murid di sekolah, dalam jangka pendek memang cepat hilang bekasnya, tetapi dampaknya dapat menahun dan bahkan 'membunuh' terbentuknya karakter baik pada diri siswa.

### **3. Studi tentang Kesenjangan Pendidikan dan Kekerasan yang Dialami Siswa Sekolah Dasar di Surabaya**

#### **a. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Oleh karena studi ini bertujuan untuk mengetahui realitas empiris tentang kesenjangan kualitas pendidikan dan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah unggulan dan nonunggulan, maka penelitian survei digunakan untuk studi ini. Dengan metode tersebut dapat diuraikan secara terperinci fenomena atau realitas empiris tentang layanan pendidikan, termasuk juga fasilitas belajar yang diterima oleh murid-murid di sekolah yang berbeda label tersebut. Di samping itu, dapat diketahui pula berbagai bentuk kekerasan, sebagai bagian dari proses pemberian hukuman (*punishment*) dan juga penghargaan (*reward*) yang dialami murid dalam proses belajarnya di sekolah. Penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) adalah salah satu strategi yang digunakan oleh guru-guru di sekolah untuk membentuk habitus siswa dan hal itu juga merupakan bagian dari iklim akademik yang dikembangkan sekolah. Perbedaan kualitas pendidikan antarsekolah, sesungguhnya juga dapat dilihat dari perbedaan habitus dan iklim akademik yang ada di masing-masing sekolah.

*Setting* penelitian difokuskan di jenjang sekolah dasar, karena pada jenjang inilah target pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi semua warga yang pertama-tama ingin dicapai oleh negara. Di samping itu, melalui hasil kajian *Independent Evaluation Group* (IEG), ditemukan bahwa kualitas hasil pendidikan dasar di Indonesia masih berada di bawah standar, terutama dalam perolehan keterampilan dan pengetahuan dasar, seperti membaca dan berhitung (Hendri, Davy, 2007). Berkaitan dengan usaha untuk memperbaiki kualitas kinerja dan hasil pendidikan di jenjang sekolah dasar, *Education For All* (EFA) atau Pendidikan Untuk Semua (PUS)—suatu gerakan internasional yang juga diikuti oleh Indonesia—mendorong agar pemerintah di negara-negara setempat segera melakukan langkah-langkah perbaikan kualitas pendidikan untuk semua, termasuk perbaikan kualitas *output* pendidikan (*outcome learning*), terutama bagi anak-anak usia sekolah dasar dari keluarga miskin. EFA dalam salah satu aksinya menargetkan bahwa pada tahun 2015 semua anak mempunyai akses yang sama atau setara untuk menyelesaikan pendidikan dasar yang berkualitas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, 2006). Gerakan EFA atau PUS itu

dilandasi oleh fakta tentang adanya kesenjangan, diskriminasi dan eksklusi terhadap anak-anak usia sekolah di berbagai lembaga pendidikan, khususnya terhadap anak perempuan, orang miskin, anak jalanan dan pekerja, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, etnik minoritas, dan kelompok-kelompok lainnya seperti para penyandang cacat (Stubbs, Sue, 2002).

**b. Lokasi Penelitian, Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan mengambil tempat di lima Sekolah Dasar negeri dan swasta, di mana dua sekolah merupakan sekolah unggulan, dan tiga sekolah lainnya dikategorikan nonunggulan. Penelitian dilakukan selama Bulan Agustus dan September 2013. Populasi dari penelitian ini adalah murid-murid yang sudah duduk di kelas 4 hingga 6. Dipilihnya murid pada jenjang tersebut, diasumsikan bahwa murid-murid yang berada di kelas 4-6 sudah lebih mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat dan harapan atau keinginannya dengan menggunakan bahasa yang runtut dan logis. Sedangkan murid yang masih duduk di kelas 1 hingga 3 masih dalam tahap belajar membaca, menulis dan berhitung, sehingga mungkin cukup menyulitkan bila pertanyaan yang diajukan sulit untuk mereka pahami. Sampel yang ditetapkan dalam studi ini berjumlah 100 murid dengan teknik pengambilan sampel adalah random sederhana (*simple random sampling*).

**c. Temuan Studi**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu: (1) bagaimana sekolah memberikan layanan pendidikan yang memadai bagi para muridnya; dan (2) apakah iklim akademik pendidikan yang dikembangkan di sekolah mengandung unsur kekerasan. Uraian pada masing-masing hal tersebut, dipaparkan ke dalam dua subbab di bawah ini.

**(i) Layanan (Sarana-Prasarana) Pendidikan Yang Tersedia di Sekolah**

Beberapa aspek layanan pendidikan yang diketengahkan dalam studi ini meliputi: (1) kapasitas murid dalam satu kelas; (2) ketersediaan buku paket di sekolah; (3) kelengkapan sarana/alat peraga IPA; (4) kelayakan perpustakaan di sekolah; (5) ketersediaan layanan pendidikan lainnya di sekolah; (6) penilaian guru terhadap hasil belajar siswa; (7) penyampaian hasil belajar kepada siswa; (8) intensitas perhatian kepala sekolah dalam proses belajar di kelas; (9) ada-tidaknya beban biaya tambahan yang harus ditanggung orangtua murid; dan (10) macam kegiatan ekstra kurikuler yang ditawarkan di sekolah.

Sesuai standar kelayakan kapasitas murid dalam satu ruang kelas, rata-rata kelas yang dianggap efektif bila dimuati oleh sekitar 20 hingga 25 murid, dengan tujuan agar guru dan murid dapat berinteraksi secara intens, sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan. Di sekolah-sekolah unggulan yang menjadi sampel penelitian ini, kapasitas ruang kelas diisi oleh lebih dari 35 murid, sedangkan di sekolah-sekolah nonunggulan, sebanyak 30 persen responden mengatakan bahwa kapasitas kelas di sekolahnya diisi oleh sekitar 20-25 murid, dan 40 persen responden mengatakan bahwa jumlah siswa dalam satu kelas rata-rata berisi 30 hingga 35 anak. Dengan demikian nampak bahwa sekolah-sekolah unggulan cenderung memaksimalkan kapasitas ruang dengan memasukkan murid dalam jumlah cukup banyak. ‘Kebijakan’ sekolah semacam itu mungkin berkaitan dengan banyaknya jumlah peminat yang ingin masuk ke sekolah-sekolah unggulan.

Tabel 1: Jumlah Murid dalam Satu Kelas

No.	Jumlah murid dalam satu kelas	Frekuensi		Persentase	
		Unggulan	Nonunggulan	% U	% Non U
1.	20-25 murid	-	15	-	30.0

2.	26-30 Murid	-	1	-	2.0
3.	31-35 murid	-	20	-	40.0
4.	Lebih dari 35 Murid	50	14	100	28.0
5.	TOTAL	50	50	100	100.0

Berdasarkan pedoman Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), pada jenjang pendidikan dasar, sekolah harus menyediakan atau meminjamkan buku-buku mata pelajaran dasar sebanyak 5 buah buku (meliputi buku: Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, IPA, PKN) kepada semua murid atau peserta didiknya. Di sekolah unggulan, hal itu sudah dilakukan, di mana sebanyak 98 persen responden mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan kelima buku itu. Sebaliknya di sekolah nonunggulan, 62 persen responden mengatakan menerima secara lengkap, 34 persen mengatakan hanya 4 buku, dan masing-masing 2 persen hanya mendapatkan 3 buku dan 1 buku.

Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) menetapkan standar pelayanan minimum dari suatu lembaga pendidikan tingkat dasar adalah memiliki sarana peraga IPA secara lengkap. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, terlihat di sekolah unggulan semua responden mengakui bahwa sarana peraga IPA tersedia secara lengkap di sekolah. Sedangkan di siswa di sekolah nonunggulan, tidak semua murid mengetahui kelengkapan sarana alat peraga IPA di sekolahnya, terbukti 28 persen responden belum mengetahui model kerangka manusia ada di sekolahnya, dan sebanyak 68 persen tidak mengetahui contoh peralatan optik.

Meskipun BSNP tidak memprasyaratkan keberadaan perpustakaan sebagai standar pelayanan pendidikan minimal di jenjang SD, namun kehadiran perpustakaan sangat dibutuhkan di setiap lembaga pendidikan. Perpustakaan merupakan salah satu sarana jendela dunia, di mana murid dapat mengetahui berbagai informasi dan pengetahuan melalui buku-buku bacaan. Di beberapa sekolah yang menjadi latar studi ini, seluruhnya memiliki perpustakaan, namun, secara spesifik hanya di sekolah-sekolah unggulan saja yang menurut pengakuan para muridnya memiliki sarana-prasarana perpustakaan yang cukup lengkap, yakni ruang yang luas dan bersih, tempat baca yang nyaman, koleksi buku-buku yang memadai, dan kemudahan dalam meminjam buku. Sedangkan di sekolah-sekolah nonunggulan, beberapa muridnya mengatakan bahwa di sekolah mereka tidak memiliki ruang perpustakaan yang luas dan bersih (96 persen), tidak memiliki tempat duduk/baca yang nyaman (74 persen), dan mereka merasa tidak diberi kemudahan untuk meminjam buku di perpustakaan (86 persen). Minimnya layanan perpustakaan yang layak di sekolah-sekolah nonunggulan, sesungguhnya menghambat minat baca para muridnya. Padahal melalui perpustakaan lah mereka memiliki kesempatan dan akses yang cukup luas untuk menimba ilmu, di samping pelajaran yang di dapatkan di bangku kelas.

Tabel 2: Fasilitas Perpustakaan Sekolah

Fasilitas Perpustakaan	S.Unggulan		S.Nonunggulan	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ruang yang luas dan bersih	50 (100%)	0	2 (4%)	48 (96%)
Tempat duduk/tempat baca yang nyaman	50 (100%)	0	13 (26%)	37 (74%)
Koleksi buku yang cukup banyak dan bervariasi	50 (100%)	0	32 (64%)	18 (36%)



Buku-buku mudah untuk dipinjam	50 (100%)	0	7 (14%)	43 (86%)
--------------------------------	-----------	---	---------	----------

BSNP juga tidak mensyaratkan ketersediaan lapangan olah raga, MCK atau WC dan air bersih, serta kantin sehat di sekolah, sebagai persyaratan minimal layanan pendidikan di jenjang sekolah dasar. Namun ketiga sarana tersebut secara tidak langsung mampu meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi murid-murid di sekolah. Berdasarkan pengakuan para murid yang berasal dari sekolah unggulan, sarana lapangan olah raga yang memadai, WC atau kamar mandi yang terpelihara, ketersediaan air bersih yang cukup dan kantin sehat, sudah ada di sekolah mereka. Sebaliknya, pada murid-murid yang berasal dari sekolah nonunggulan, fasilitas atau sarana seperti itu tidak semua tersedia di sekolah. Mereka mengatakan bahwa di sekolah mereka tidak ada lapangan olah raga dengan halaman yang cukup luas, sehingga seringkali mereka harus ke luar sekolah jika jam pelajaran olah raga berlangsung, begitu pula dengan air bersih dan kantin sehat, tidak mereka nikmati di sekolah. Sedangkan kondisi WC atau kamar mandi, ada sebagian responden mengatakan sudah dipelihara dengan baik di sekolahnya, namun sebagian lagi mengatakan tidak terpelihara dengan baik.

Tabel 3: Ketersediaan Sarana-Prasarana Lainnya di Sekolah

Sarana-Prasarana	Sekolah Unggulan		Sekolah Nonunggulan	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Lapangan olah raga deng halaman cukup luas	50 (100%)	0	0	50 (100%)
Pemeliharaan sarana WC dan Kamar Mandi cukup untuk siswa	50 (100%)	0	25 (50%)	25 (50%)
Ketersediaan air bersih yang cukup untuk siswa	50 (100%)	0	0	50 (100%)
Ketersediaan kantin dan makanan sehat di sekolah	50 (100%)	0	0	50 (100%)

Standar pelayanan minimal di jenjang pendidikan dasar dalam proses belajar di kelas, juga mensyaratkan adanya evaluasi atau penilaian hasil belajar yang cukup lengkap dari guru kepada para muridnya. Semakin lengkap guru melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswanya, maka semakin baik proses pembelajaran berlangsung di sekolah. Menurut pengakuan para siswa yang menjadi responden di sekolah unggulan, semuanya mengatakan bahwa di sekolah para guru mereka memberikan penilaian atau evaluasi menyeluruh, mulai memberi nilai pada Pekerjaan Rumah (PR), melaksanakan ulangan harian, menyelenggarakan Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS). Sedangkan menurut pengakuan para murid di SD nonunggulan, masih ada guru di sekolah mereka (16 persen) yang tidak memberikan penilaian menyeluruh terhadap hasil belajar para muridnya (meliputi PR, ulangan harian, UTS dan UAS).

Persyaratan minimal standar layanan pendidikan juga meliputi keajegan sekolah menyampaikan laporan hasil belajar kepada para siswa maupun orangtuanya. Di sekolah-sekolah unggulan, semua murid yang terambil sebagai responden mengakui bahwa mereka selalu mendapatkan semua penilaian atau evaluasi hasil belajarnya. Hal berbeda dialami oleh murid-murid di sekolah nonunggulan. Masih ada beberapa siswa yang mengaku, bahwa mereka

tidak mengetahui evaluasi atau penilaian hasil belajar yang seharusnya diberikan kepada siswa atau orangtuanya, seperti nilai Ujian Nasional (UN). Terdapat 24 persen responden yang mengatakan tidak mengetahui hasil UN dibagikan kepada para murid. Begitu pula dengan ulangan harian dan UTS, masih ada beberapa siswa (46 persen) yang tidak mengetahui bahwa seharusnya setiap evaluasi atau penilaian hasil belajar disampaikan kepada mereka atau orang tua mereka. Jika demikian halnya, hak murid dari sekolah-sekolah unggulan cenderung diabaikan, terutama dalam mengetahui hasil evaluasi belajarnya.

BSNP juga mensyaratkan, bahwa perhatian kepala sekolah dalam proses belajar di kelas, juga menjadi salah satu bentuk pelayanan minimal pendidikan yang harus ada di sekolah. Supervisi kepala sekolah ke kelas-kelas itu penting bagi meningkatkan kapabilitas dan kualitas guru-guru dalam mengajar, karena dengan mengetahui kegiatan belajar di kelas, kepala sekolah dapat memberikan masukan kepada para guru, seperti dalam metode pembelajaran maupun aktivitas di kelas. Namun pentingnya supervisi kepala sekolah ke kelas-kelas, belum menjadi suatu kebiasaan (*habitus*) di berbagai sekolah. Terbukti, hanya 25 persen murid di sekolah unggulan mengatakan bahwa kepala sekolah mereka sering melakukan supervisi ke kelas-kelas, dan sebagian lagi mengatakan jarang (25 persen). Bahkan di sekolah-sekolah nonunggulan, sebanyak 56 persen responden mengatakan bahwa kepala sekolah mereka jarang melakukan supervisi ke kelas-kelas (56 persen) dan bahkan sebanyak 42 persen responden mengatakan tidak pernah.

Biaya pendidikan memang tidak menjadi standar pelayanan minimal di jenjang pendidikan dasar, bahkan negara telah memberi subsidi biaya pendidikan di seluruh sekolah dasar di Indonesia, di mana subsidi itu dikenal dengan nama program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dengan adanya dana BOS itu diharapkan sekolah tidak lagi menarik biaya pendidikan kepada orangtua murid, sehingga program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dapat terealisasi dengan baik. Namun, apa yang menjadi wacana pemerintah nampaknya tidak sejalan dengan realitas yang terjadi di sekolah. Meskipun sudah ada himbuan dari pemerintah agar sekolah tidak lagi membebani orangtua dengan biaya-biaya yang tidak diperlukan, tetapi tetap saja sekolah membutuhkan dukungan dana dari orangtua murid. Hal itu terjadi tidak saja di sekolah-sekolah unggulan tetapi juga di sekolah-sekolah nonunggulan.

Di sekolah-sekolah nonunggulan, biaya tambahan yang harus ditanggung orangtua murid meliputi uang bimbingan belajar/les tambahan pelajaran (56 persen), pembayaran UAS (64 persen), pembayaran kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan (40 persen), serta pembayaran buku pelajaran atau LKS (28 persen). Sedangkan di sekolah-sekolah unggulan, sebagian responden mengatakan bahwa mereka tidak harus membayar biaya-biaya tambahan (50 persen), namun sebagian responden yang lain (50 persen) mengatakan bahwa orangtua mereka membayar sekaligus dalam satu tahun untuk berbagai kegiatan di sekolah yang membutuhkan pembiayaan dengan nominalnya berkisar antara Rp 750.000 hingga 1.000.000.

Kegiatan ekstra kurikuler memang juga bukan menjadi salah satu prasyarat standar pelayanan minimal pendidikan yang ditetapkan oleh BSNP. Namun keberadaan kegiatan ekstra kurikuler ini diperlukan sebagai sarana untuk mengembangkan minat, bakat dan potensi siswa. Jika kegiatan belajar hanya difokuskan pada kegiatan kurikuler saja tanpa ada kegiatan penyegaran lainnya, seperti olah raga, kesenian, atau keterampilan lainnya, maka murid cenderung bosan di sekolah. Memang variasi kegiatan ekstra kurikuler tergantung dari kesepakatan antara sekolah dan orangtua siswa atau siswa di masing-masing sekolah, juga

tergantung dari kemampuan sekolah menyediakan guru atau pembimbingnya, di samping juga dana tambahan yang mampu dibayarkan sekolah untuk menggaji guru atau pembimbing kegiatan ekstra kurikuler. Berdasarkan data yang terkumpul, terlihat bahwa di sekolah-sekolah unggulan, cukup banyak kegiatan ekstra kurikuler yang ditawarkan, mulai dari kegiatan kesenian (tari klasik, puisi, drumband, qosidah), bermacam olah raga (basket, futsal, pencak silat, tenis meja, renang) hingga keterampilan yang beragam (menyulam, jurnalis, memasak, menjahit, bahasa Inggris, dan fotografi). Sedangkan di sekolah nonunggulan, kegiatan ekstra kurikuler yang ditawarkan tidak sebanyak di sekolah unggulan, dan kebanyakan hanya berupa kegiatan olah raga dan juga pramuka.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa murid-murid di sekolah unggulan dapat dikatakan lebih beruntung dibandingkan dengan murid-murid di sekolah nonunggulan, karena sarana-prasarana pendidikan yang ada di sekolah unggulan lebih layak dan memadai dibandingkan dengan di sekolah nonunggulan. Keterbatasan sarana-prasarana pendidikan yang dialami murid-murid di sekolah nonunggulan dapat disebut sebagai suatu bentuk kekerasan simbolik, karena murid-murid di sekolah nonunggulan harus menerima keterbatasan itu sebagai hal yang wajar dan mungkin tidak perlu mereka pertanyakan, karena kondisi sekolah memang sudah memprihatinkan. Disebut sebagai kekerasan simbolik pula ketika hak-hak siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak diabaikan oleh negara.

#### a. Iklim Akademik dan Kekerasan di Sekolah

Bagian ini berupaya menggali iklim akademik di sekolah, khususnya melalui kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan belajar di kelas. Diasumsikan, bahwa sekolah-sekolah yang lebih mementingkan kualitas pembelajarannya, cenderung lebih banyak memberikan penghargaan kepada para siswanya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang belum berfokus meningkatkan kualitas pendidikannya. Hal ini karena guru-guru tidak lagi disibukkan dengan upaya “menundukkan” murid-murid yang dianggap belum memahami nilai dan norma-norma atau iklim akademis yang ada di sekolah, karena murid-murid yang ada di dalamnya telah memiliki habitus yang dibekalkan oleh orangtua mereka, di mana habitus murid itu sejalan dengan habitus yang dikembangkan di sekolah. Sebaliknya, pada sekolah-sekolah yang belum berfokus pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, cenderung masih harus menggunakan berbagai macam bentuk hukuman (*punishment*) yang terkadang berbentuk kekerasan fisik dan verbal kepada para siswanya, karena para guru cenderung memiliki anggapan bahwa murid-murid mereka berasal dari keluarga yang berlatar belakang budaya dan habitus yang beragam. Berikut ini diuraikan berbagai macam aktivitas di sekolah yang berdampak pada diberikannya penghargaan dan hukuman bagi para siswa.

Di sekolah-sekolah unggulan maupun nonunggulan, perlakuan guru-guru terhadap para muridnya relatif sama, yaitu para murid diharapkan mendapatkan nilai baik untuk semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Namun, tuntutan nilai minimal di masing-masing sekolah ternyata berbeda. Di sekolah-sekolah unggulan, nilai minimal yang harus dipenuhi siswa rata-rata berkisar antara 70 hingga 75. Sedangkan di sekolah-sekolah nonunggulan nilai minimal yang harus dipenuhi siswa berkisar antara 65 hingga 70. Capaian hasil belajar yang lebih tinggi yang harus diraih siswa di sekolah unggulan, nampaknya merupakan salah satu bentuk kekerasan simbolis yang dialami siswa. Hal ini karena siswa di sekolah unggulan—terpaksa atau tidak—harus mengikuti iklim akademis yang telah terbentuk di sekolah, di mana salah satu bentuk habitus di sekolah unggulan, adalah ‘memaksa’ para siswanya untuk belajar keras agar

memperoleh prestasi belajar dan bahkan hasil Ujian Nasional yang tinggi. Iklim akademis semacam itu mungkin direproduksi demi kepentingan dan nama baik sekolah atau mungkin juga disebabkan oleh gengsi atau prestis yang disandang sekolah tersebut, yaitu sebagai sekolah unggulan. Di samping itu, harapan orangtua sangat besar dicurahkan kepada sekolah, karena orangtua merasa, bahwa sekolah unggulan adalah sekolah yang mampu mencetak murid-murid berprestasi, khususnya dalam bidang akademik dan itu diwujudkan dalam bentuk nilai ujian yang tinggi.

Berbeda halnya dengan iklim akademik yang terbentuk di sekolah-sekolah non unggulan yang cenderung tidak menuntut siswa untuk memiliki prestasi belajar atau nilai raport yang tinggi. Hal itu nampaknya sejalan dengan data yang terkumpul, di mana di sekolah-sekolah unggulan, guru cenderung masih menekankan pemberian hukuman ketika murid-muridnya tidak mendapatkan nilai baik (72 persen). Sedangkan di sekolah non unggulan toleransi guru terhadap kemampuan siswa untuk tidak mendapatkan nilai baik cukup tinggi, terbukti sebanyak 42 persen guru tidak memberikan hukuman kepada murid-muridnya ketika mereka mendapat nilai jelek dalam hasil ujiannya. Realitas yang berbeda ini menunjukkan bahwa ada penekanan kekerasan, fisik maupun simbolik, yang terjadi di sekolah unggulan. Di sekolah unggulan, murid mengalami kekerasan fisik, selain juga simbolik, ketika mereka tidak mampu mendapatkan prestasi atau hasil belajar yang tinggi. Namun di sekolah nonunggulan, murid tidak mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru ketika mereka tidak mampu meraih nilai atau prestasi belajar yang tinggi di sekolah.

Selain *punishment*, *reward* nampaknya juga menjadi salah satu pendorong bagi siswa untuk berprestasi. Di sekolah-sekolah unggulan, murid-murid di samping mendapat hukuman ketika mereka tidak mendapatkan prestasi belajar yang baik, mereka juga diberi hadiah/penghargaan ketika hasil prestasi belajar mereka baik. Terbukti sebanyak 74 persen responden mengatakan bahwa guru-guru mereka memberikan hadiah/penghargaan. Sedangkan di sekolah nonunggulan hanya 30 persen responden yang merasakan bahwa guru mereka memberikan hadiah/penghargaan manakala mereka berhasil mendapatkan nilai pelajaran yang baik, sedangkan 70 persen sisanya, mengatakan bahwa guru-guru mereka tidak pernah memberi penghargaan atau hadiah. Realitas ini menunjukkan bahwa guru-guru di sekolah nonunggulan cenderung tidak peduli terhadap hasil jerih payah para siswanya, dalam hal ini adalah mampu menunjukkan prestasi belajar yang baik.

Variasi hukuman dan penghargaan di masing-masing sekolah berbeda. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, nampak bahwa murid-murid dari sekolah unggulan, lebih banyak diminta oleh guru-guru mereka mengikuti kegiatan remedial atau mengulang mengerjakan soal-soal ujian (46 persen), dibandingkan memberikan hukuman fisik bila nilai ujian mereka buruk. Sedangkan di sekolah-sekolah nonunggulan, bentuk hukuman yang diterima siswa berupa hukuman verbal/ dimarahi dan fisik/ dicubit (44 persen), ketika mereka mendapat hasil nilai ujian yang buruk. Ini berarti, ada orientasi yang berbeda di antara guru-guru di sekolah unggulan maupun nonunggulan ketika memberikan hukuman. Di sekolah unggulan, bentuk hukumannya cenderung berupa kekerasan simbolik yang sifatnya halus namun mampu 'memaksa' murid untuk tunduk pada harapan dan keinginan guru mereka, misalnya dengan menasehati atau meminta murid untuk mengikuti ujian perbaikan atau *remedial*. Sedangkan di sekolah nonunggulan, guru-guru cenderung memberikan hukuman kekerasan fisik atau verbal kepada para muridnya.

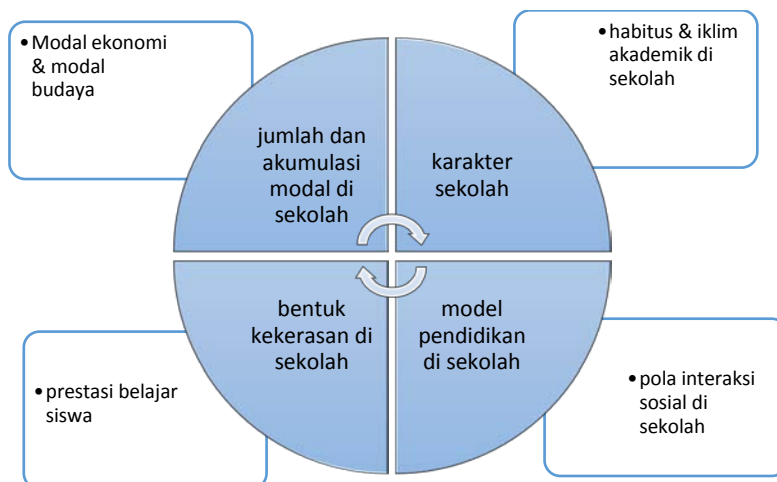
Prestasi belajar, tidak harus diperoleh siswa dari kegiatan akademik, tetapi juga meliputi kegiatan nonakademis, seperti kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang ditekuni siswa. Di sekolah unggulan, semua siswa mengatakan bahwa guru-guru mereka memberi dorongan penuh kepada para siswanya untuk mengikuti kegiatan non akademis (100 persen), seperti mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan kegiatan ekstra kurikuler. Sedangkan responden dari sekolah nonunggulan, sebagian besar mengatakan (74 persen) bahwa guru-guru mereka tidak memberikan dorongan kepada para murid-muridnya untuk mengikuti kompetisi atau lomba-lomba di bidang nonakademis. Dukungan penuh yang diberikan oleh para guru di sekolah unggulan kepada siswa-siswanya nampaknya juga didukung oleh pemberian penghargaan oleh sekolah kepada siswa yang memenangi juara atau kompetisi tersebut.

Realitas yang berbeda yang terjadi di dua sekolah yang berbeda karakteristik ini menunjukkan bahwa murid-murid dari sekolah unggulan cenderung lebih banyak dibekali dengan modal budaya yang berlimpah, di samping juga modal intelektual melalui capaian prestasi akademis yang dituntut tinggi oleh sekolah. Sebaliknya, bagi murid-murid dari sekolah nonunggulan hak-hak mereka untuk mendapatkan perlakuan dan layanan pendidikan yang baik dan memadai cenderung diabaikan oleh guru-guru di sekolah. Pengabaian itu mungkin disebabkan oleh keterbatasan sarana-prasarana pendidikan di sekolah, bisa pula disebabkan oleh perlakuan guru yang mengaggap murid-muridnya tidak mampu (*underestimate*) dalam mengikuti berbagai kegiatan nonakademis.

Selain penghargaan, ada kalanya siswa juga mendapat hukuman di sekolah yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademis, seperti murid membuat keributan di kelas, murid datang terlambat ke sekolah, atau murid membuat onar atau berkelahi di sekolah. Berdasarkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan murid, dan bentuk-bentuk hukuman yang diberikan pihak sekolah (guru), beberapa hal dapat diuraikan, yaitu: (1) hukuman yang diterima murid-murid di sekolah nonunggulan cenderung berupa hukuman fisik (berdiri di depan kelas, berlari mengelilingi sekolah) dan verbal (memarahi/mengomel); (2) hukuman yang diterima murid-murid di sekolah unggulan lebih banyak yang dilakukan secara verbal (memarahi/mengomel) dan juga dilakukan dengan cara persuasif, yaitu memberi nasehat; (3) hukuman yang diterima murid-murid di sekolah unggulan, jauh lebih keras terjadi ketika murid-murid lupa atau tidak mengerjakan PR, di mana sebanyak 10 persen responden pernah mendapat hukuman badan, seperti dipukul, ditempeleng atau dicubit.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan bentuk kekerasan, baik berupa kekerasan fisik, verbal maupun simbolik yang dialami murid-murid di sekolah unggulan dan nonunggulan, pertama-tama disebabkan oleh kesenjangan sarana-prasarana pendidikan dan berkaitan pula dengan perbedaan akumulasi kepemilikan modal (modal ekonomi dan budaya) serta iklim akademis yang terbentuk di masing-masing sekolah. Berdasarkan kedua aspek tersebut maka dapat terlihat adanya model atau pola interaksi yang berbeda di antara guru dan murid di dua tipe sekolah tersebut.

## Hubungan Antara Kesenjangan Modal (Ekonomi dan Budaya), Habitus dan Pola Interaksi yang Melahirkan Berbagai Bentuk Kekerasan di Sekolah



### 6. Penutup

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Layanan pendidikan yang diterima siswa di sekolah unggulan dan nonunggulan cenderung berbeda. Sekolah unggulan secara umum cenderung telah mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sedangkan di sekolah nonunggulan belum mampu memenuhi semua persyaratan SPM. Dalam konteks ini sekolah unggulan memiliki modal ekonomi maupun modal budaya yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah nonunggulan meskipun untuk itu, sekolah unggulan harus berkompromi dengan masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang dianggap berkualitas dengan menambah kapasitas bangku murid melebihi jumlah ideal yang dipersyaratkan. (2) Oleh karena di sekolah unggulan cenderung mampu memenuhi SPM, maka sekolah unggulan dapat dikatakan mampu menyediakan fasilitas/sarana-prasarana belajar yang layak dan memadai. Sebaliknya di sekolah nonunggulan belum mampu menyediakan fasilitas/sarana-prasarana pendidikan dan belajar yang layak. (3) Iklim akademik yang berbeda di sekolah unggulan dan nonunggulan, membawa konsekuensi pada perbedaan bentuk-bentuk penghargaan dan hukuman yang dialami siswa di masing-masing sekolah, di mana: (a) Di sekolah unggulan, iklim akademik diliputi oleh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh prestasi belajar yang tinggi serta kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang diiringi dengan dorongan kepada siswa untuk mengikuti kompetisi atau lomba-lomba di kegiatan nonakademis. Meskipun lebih banyak penghargaan (*reward*) diberikan kepada para muridnya, tetapi berbagai hukuman (*punishment*) juga pernah dialami oleh murid-murid di sekolah unggulan, di mana hukuman terberat (cenderung mengarah pada hukuman fisik) terjadi ketika murid-murid melalaikan kegiatan atau tugas-tugas akademis. (b) Di sekolah nonunggulan, iklim akademik tidak atau belum mengarah pada upaya

peningkatan kualitas proses belajar siswa, karena guru atau kepala sekolah tidak menuntut murid-muridnya mencapai nilai hasil belajar yang tinggi. Penghargaan lebih sedikit diberikan kepada murid-murid di sekolah nonunggulan dibandingkan dengan bentuk-bentuk hukumannya. Terbukti, cukup banyak siswa yang seringkali mendapatkan hukuman fisik dan verbal untuk berbagai bentuk pelanggaran yang mereka lakukan. Sedikitnya penghargaan guru terhadap siswa, dan sebaliknya seringkali siswa mendapat hukuman fisik, menunjukkan adanya tindakan atau perlakuan yang diskriminatif dari para guru terhadap murid-muridnya. Artinya, guru-guru di sekolah nonunggulan cenderung tidak menghargai eksistensi dan hak-hak murid.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah, terutama pada sekolah unggulan dan nonunggulan cenderung akan terus berlangsung, apabila: (a) Pemerintah tidak turun tangan membenahi kekurangan-kekurangan yang dialami di sekolah-sekolah nonunggulan (menyediakan modal ekonomi dan modal budaya yang mencukupi); (b) Guru-guru di sekolah nonunggulan tidak memberi penghargaan yang layak dan memadai kepada para muridnya, dan cenderung mengembangkan budaya kekerasan di sekolah (guru mengembangkan habitus kekerasan). Dengan kekerasan yang dialami siswa di sekolah, hal itu bukannya membuat siswa menjadi tunduk atau patuh serta jera terhadap pelanggaran yang dilakukannya, tetapi malah akan semakin membuat siswa melawan dan sulit diatur; (c) Perbedaan latar budaya di antara para murid dengan guru-gurunya, juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid-muridnya. Apabila guru tidak mampu memahami budaya yang berbeda di antara para muridnya, maka sulit bagi guru untuk mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan di sekolah.

#### **b. Saran**

Memperhatikan temuan dan kesimpulan dari hasil studi ini, maka beberapa saran bisa diajukan untuk meminimalisasi kesenjangan kualitas pendidikan di antara sekolah-sekolah unggulan maupun nonunggulan: (1) Dinas pendidikan kota sebagai aparat birokrasi yang berwenang terhadap peningkatan kualitas pendidikan di tingkat kota, seharusnya melakukan supervisi atau pengawasan secara berkala, khususnya pada sekolah-sekolah nonunggulan, dalam hal: (a) menjamin ketersediaan sarana-prasarana pendidikan yang layak dan memadai bagi murid-muridnya; (b) menumbuhkan iklim akademis yang lebih kondusif bagi peningkatan prestasi belajar para murid, serta meminimalisasi terjadinya berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru-guru kepada muridnya. (2) Memberikan bekal pengetahuan kepada guru-guru (upaya pembentukan habitus ramah siswa), baik di sekolah unggulan maupun nonunggulan, khususnya dalam hal pemberian jaminan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak didik. Hak-hak anak perlu dipahami guru agar segala bentuk kekerasan dapat dihindari. Selain itu, guru juga dilatih kepekaan dan kreatifitasnya dalam menciptakan iklim belajar yang menyenangkan bagi murid dalam proses belajarnya di sekolah.

#### **Daftar Pustaka**

**Bourdieu, Pierre, 1977, *Cultural Reproduction and Social Reproduction*, dalam Jerome Karabel & A.H. Halsey, *Power and Ideology in Education*, New York: Oxford University Press. Inc**

- Bowles, Samuel & Herbert Gintis, 1976, *Schooling in Capitalist America*, New York: Basic Book, Inc.
- Budirahayu, Tuti, 2012, Reproduksi Kesenjangan Kualitas Pendidikan Antarsekolah Dasar Negeri dalam Dinamika Kultural dan Struktural di Sekolah, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta**
- Greydanus E, Donald (2003), *Kekerasan Dalam Pendidikan di Indonesia*, tersedia dalam <http://sasyapsikologi2006.blogspot.com/2010/01/kekerasa-dalam-pendidikan-di-indonesia.html>
- Harker, Richard, Cheelen Mahar, Chris Wilkes (eds), 2009, (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik (terjemahan dari An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory, 1990), Yogyakarta: Jalasutra**
- Hendri, Davy, *Pendidikan Dasar, Kuantitas vs Kualitas?* Tersedia pada: <http://klikdiksos.blogspot.com/2007/07/pendidikan-dasar-kuantitas-vs-kualitas.html> (Senin, 31 Juli 2007)
- Indarwanto, Eko, 2004, tersedia pada: <http://sayapsikologi2006.blogspot.com/2010/01/kekerasa-dalam-pendidikan-di-Indonesia.html>
- Irawan, Ade, dkk., 2006, *Buruk Wajah Pendidikan Dasar: Riset Kepuasan Warga Atas Pelayanan Pendidikan Dasar di Jakarta, Garut, dan Solo*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch dan 11.11.11
- Jenkins, Richard, 2004, *Membaca Pikiran-Pikiran Pierre Bourdieu* (terjemahan dari Pierre Bourdieu, 1992), Yogyakarta: Kreasi Wacana Jenkins, Richard, *Key Sociologists: Pierre Bourdieu*, 1992, Routledge: London and New York, first published, hal.66
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (terjemahan, dari *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1995), Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Marcoes, Lies, 2002, *Gender dan Pembangunan*, tersedia pada: <http://maryuningsihningsih.blogspot.com/2013/05/kekerasan-di-sekolah.html>
- Susilowati (2008), dalam Rudi, 2012, tersedia dalam: <http://rudidw.blogspot.com/2012/09/teori-kekerasan.html>
- Stubbs, Sue, 2002, *Pendidikan Inklusif, Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber* (terjemahan), The Atlas Alliance, Global Support to Disabled People
- Tomasevski, Katarina, 2003, *Education Denied: Cost and Remedies*, Zed Books, London & New York
- Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas*, tersedia pada: <http://www.bappenas.go.id/index.php?> (Februari 2007).
- Wajah Pendidikan Bangsa*, Hasil Survei Dasar Pendidikan Nasional 2003, Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah”, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional – Republik Indonesia. (tanpa tahun)
- Laporan Rencana Aksi Pendidikan untuk Semua Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, Januari 2006